



## Pengaruh pengendalian internal & e-procurement terhadap fraud

Inta Budi Setya Nusa

Universitas Komputer Indonesia

[inta.budi@email.unikom.ac.id](mailto:inta.budi@email.unikom.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 20 Januari 2022

Disetujui 2 Februari 2022

Diterbitkan 16 Februari 2022

#### Kata kunci:

Pengendalian internal,

E-procurement,

Penipuan

#### Keywords:

Internal control,

e-procurement,

Fraud

### ABSTRAK

Pengawasan, pengendalian dan koordinasi yang belum memadai di bidang pengelolaan aset daerah menjadi penyebab terjadinya kecurangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Faktor penyebab terjadinya kecurangan adalah proses lelang yang tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menilai pengaruh pengendalian internal terhadap fraud dan E-procurement terhadap fraud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel Pengendalian intern, variabel E-procurement dan Fraud. Untuk mengetahui pengaruh variabel Pengendalian Internal dan variabel E-procurement terhadap Fraud dilakukan dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah desain model struktural, desain model pengukuran, diagram garis, uji kecocokan model. Uji kecocokan model struktural dan hipotesis menggunakan software Smart PLS 2.0. M3. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Auditor internal dan Inspektorat Barang Milik Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh cukup tinggi terhadap Fraud dan E-procurement berpengaruh cukup tinggi terhadap fraud, pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

### ABSTRACT

Supervision, control and coordination have not been adequate in the asset management area is the cause of the occurrence of fraud at the Department of revenue and the financial and assets Management area of West Bandung Regency factors led to fraud is the auction process that is not in accordance with the rules of procurement of goods and services electronically. The purpose of this study is to analyze and assess influence of internal controls against fraud and E-procurement against fraud. The methods used in this research is descriptive method and verifikatif. The descriptive method was used to find out the description of the variable Internal control, variable E-procurement and Fraud. To know the influence of Internal control variables and variable E-procurement against Fraud done with test statistics. The statistical test used was the structural model design, design a model of measurement, line diagrams, test the fit of the model. Test the fit of the structural model and hypotheses using the software Smart PLS 2.0. M3. The Unit of analysis in this research was an employee of Department of Revenue and the financial management and internal Auditors and regional Assets Inspectorate West Bandung Regency. The research results showed that internal control influential high enough against Fraud and E-procurement influential high enough against fraud, on the Department of revenue and the financial and assets Management area of West Bandung Regency.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Aktivitas organisasi pasti ada ketidakpastian yang identik dengan resiko, diantaranya resiko kecurangan (Karyono, 2013:1). Fraud (kecurangan) selalu berdampak kerugian bagi yang menjadi korban baik organisasi korporasi maupun organisasi publik, makin besar fraud makin besar pula kerugian yang diderita, kerugian tersebut berupa tujuan tidak tercapai, hilangnya aset organisasi, dan berkurangnya reputasi organisasi serta hilangnya kepercayaan masyarakat (Karyono, 2013:1). Istilah fraud belum dikenal secara luas di Indonesia, masyarakat Indonesia lebih akrab dengan istilah korupsi untuk merujuk segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri sendiri atau kelompok pelaku, istilah fraud dan korupsi sama-sama merujuk pada kejahatan (pidana) terencana yang merugikan negara/perusahaan/organisasi/oranglain namun, perlu

dicatat bahwa fraud memiliki cakupan yang lebih luas dari korupsi, bahkan korupsi dalam arti tertentu dapat juga dikategorikan sebagai salah satu bagian dari fraud (Purba, 2015:1).

Fraud adalah setiap perbuatan tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan/jabatan atau penyimpangan) yang bertujuan mengambil uang (atau harta atau sumber daya orang lain/organisasi) melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kecurangan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, penyembunyian atau cara-cara lain yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, yang mengakibatkan kerugian organisasi atau orang lain dan/atau menguntungkan pelaku (Purba, 2015:2).

Riset dari Michael Buehler (2012) mengenai reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dan merujuk data Indonesia Procurement Watch (IPW) menunjukkan 70% praktik korupsi berakar dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah (Ade Maman Suherman, 2015). Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), catatan korupsi semester II tahun 2013 menunjukkan dari 267 kasus korupsi 42,70 persen merupakan kasus Pengadaan Barang dan Jasa dimana pejabat/pegawai pemerintah daerah merupakan aktor utama korupsi dari 1271 tersangka, sekitar 47,6% (605 orang) merupakan tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa (Ade Maman Suherman, 2015). Fakta lain, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2014, penanganan berdasarkan jenis perkara menunjukkan dari 58 perkara korupsi sepanjang 2014, 15 di antaranya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa (Ade Maman Suherman, 2015).

Fraud lebih banyak terjadi di instansi pemerintah karena organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, pengendalian internal merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi Kontrol (Karyono, 2013:48). Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan organisasi dalam kategori berikut. Yaitu, keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional organisasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Randal J. Elder dkk, 2011:353).

IHPS I tahun 2015 dari pemeriksaan atas 666 objek pemeriksaan, BPK menemukan sebanyak 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.890 (51,12%) masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 33.46 triliun dan 7.544 (48,88%) masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dari masalah ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.609 masalah berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan (atau berdampak finansial) senilai Rp 21.62 triliun (Harry Azhar Azis, 2015).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pengendalian Internal**

Defenisi pengendalian internal yang dinyatakan oleh Committee of Sponsoring Organizations of Tread way Commission (COSO) (2013:3) Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance. Adapun menurut IAPI (2011:319.2) yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2012:100) mendefinisikan Pengendalian internal sebagai suatu proses yang di jalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) Keandalan laporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kerangka kinerja pengendalian internal yang dikeluarkan oleh committee of sponsoring organizations (COSO) (2013:5). "Internal control consists of five integrated components:

- 1) Control Environment
- 2) Risk Assessment
- 3) Control Activities
- 4) Information And Communication
- 5) Monitoring Activities"

### **Pengertian E-Procurement**

Menurut Adrian Sutedi (2012:254) mendefinisikan Pengadaan secara elektronik (e-procurement) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung dengan efektif, efisien, terbuka, bersaing, dan akuntabel. Sedangkan menurut Samsul Rambli (2014:325) mendefinisikan Pengadaan secara elektronik (e-procurement) adalah

Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan dilakukan dengan cara e-tendering dan e-purchasing. Aplikasi teknologi informasi yang baik dapat menyebabkan data lebih cepat diproses dan terjadi akurasi, menurut Adrian Sutedi (2014:264) Aspek yang perlu diperhatikan dalam e-procurement adalah:

- 1) Keamanan
- 2) Confidentiality (Kerahasiaan)
- 3) Integrity
- 4) Availability
- 5) Non-repudiation

### **Pengertian Fraud**

Menurut Karyono, 2013:44 mendefinisikan fraud adalah Perbuatan penyimpangan dan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi/kelompok dan akibat merugikan pihak lain. Adapun menurut William F. Messier, Steven M. Glover, dan Douglas F. Prawitt (2014:112) Mendefinisikan Kecurangan adalah Tindakan disengaja oleh satu atau lebih orang di antara manajemen yang diberi tugas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, meliputi menggunakan kecurangan untuk mendapatkan manfaat yang tidak adil atau illegal. Menurut Karyono (2014:13) Kecurangan dapat diklasifikasikan menurut pelaku kecurangannya yaitu:

- 1) Kecurangan Manajemen (Management Fraud)
- 2) Kecurangan Karyawan (Non-management Fraud)
- 3) Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (Ekstern)
- 4) Kecurangan yang Melibatkan Orang Dalam dan Orang Luar Organisasi

### **Kerangka Pemikiran**

#### **Pengaruh Pengendalian Internal terhadap fraud**

Menurut Karyono (2013:96) mengemukakan bahwa pengendalian internal antara lain dirancang untuk dapat mengamankan harta milik organisasi. Bila pengendalian internal tidak dapat berfungsi efektif sebagai sarana kendali, kemungkinan besar terjadi Fraud. Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:103), mengemukakan bahwa: pengendalian internal berpengaruh terhadap fraud, Jika pengendalian intern badan suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian intern suatu badan usaha kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diperkecil. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Faisal (2012) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin efektif pengendalian internal perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan”.

#### **Pengaruh E-Procurement Terhadap Fraud**

Menurut Adrian Sutedi (2014:272) mengemukakan bahwa e-procurement merupakan instrumen untuk mengembangkan Good Governance dan pencegahan KKN baik sektor pemerintah maupun dunia usaha, penerapan e-procurement secara otomatis meningkatkan kontrol terhadap penyimpangan dan pelanggaran hukum. Sedangkan Rahmawan Satriyo Nugroho, dkk (2011) dalam hasil penelitian di kabupaten magetan mengemukakan bahwa Implementasi e-procurement pada skpd Kabupaten Magetan mengalami peningkatan maka efektifitas pencegahan fraud pengadaan barang/jasa juga akan mengalami peningkatan. Liya Indah Wulandari, dkk (2014) dalam hasil penelitian di kota malang mengemukakan bahwa penerapan e-procurement telah mengurangi penyimpangan (fraud) pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang”.

### **Hipotesis**

Hipotesis penelitian dapat sebagai asumsi atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang perlu dibuktikan secara statistik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Fraud pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. E-procurement Berpengaruh Terhadap Fraud pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan antara variabel yang di teliti sehingga menghasilkan kesimpulan.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiono (2013:147) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan tujuan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis Pengendalian Internal dan E-Procurement terhadap Fraud. Metode verifikatif yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (Structural Equation Model – SEM) berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan Partial Least Square (PLS). Pertimbangan dengan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif.

### **Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002) dalam Umi Narimawati (2010:31) adalah penentuan construct sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalkan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengujuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik. Dalam operasional variabel ini semua variable diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pertanyaan-pertanyaan tipe skala rating skale. Menurut Sugiyono (2013:141), Skala rating adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan.”

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan (Library Reseach). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (Field Research)

- a. Wawancara (Interview)

Menurut Umi Narimawati (2010:40) wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

- b. Kuesioner

Menurut Umi Narimawati (2010:40) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya.

2. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (text book), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

## Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel jenuh atau istilah lainnya adalah sampel jenuh adalah sensus. Pengertian sampel jenuh menurut Sugiyono (2013:85) adalah sebagai berikut: “Sampel Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil”.

Pada penelitian ini sampel yang diteliti yaitu 20 pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 20 auditor Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.

## Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

### 1. Analisis Data Deskriptif

Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Bandung berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

### 2. Analisis Data Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS 2.0. Penulis menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (variable manifest), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (error). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya. Menurut Imam Ghozali (2006:18), Partial Least Square (PLS) merupakan merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan Partial Least Square (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

## Pengujian Hipotesis

hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan  $H_0$  ditolak jika  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai kritis untuk  $\alpha = 0,05$  sebesar 1,960.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Pengujian valid atau tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya  $\geq 0,30$ , maka pernyataan tersebut dinyatakan valid teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi pearson product moment. hasil pengujian validitas kuesioner di atas, terlihat bahwa seluruh pernyataan yang diajukan untuk masing-masing variabel yang terdiri dari pengendalian internal, e-procurement dan fraud memiliki koefisien validitas di atas 0,3 yang menunjukkan bahwa seluruh pernyataan tersebut sudah melakukan fungsi ukurnya (mampu mengukur tiap indikator). Sehingga mampu mencapai tujuan pengukuran (menghasilkan data) untuk setiap variabel laten dalam penelitian ini.

### Hasil Pengujian Reliabilitas

Selain valid, alat ukur juga harus memiliki reliabilitas atau keandalan. Suatu alat ukur dapat dikatakan andal jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama

(tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal atau tidaknya suatu alat ukur dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas nilainya  $\geq 0,70$ , maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel). Metode uji reliabilitas adalah Split Half Method (Spearman-Brown Correlation) atau Teknik Belah Dua. hasil pengujian reliabilitas di atas, terlihat bahwa ketiga variabel yang diuji yakni pengendalian internal, e-procurement dan fraud memiliki nilai koefisien reliabilitas di atas titik kritis 0.7 yang menunjukkan bahwa ketiga variabel yang diuji sudah menunjukkan keandalannya.

### **Analisis Deskriptif Pengendalian Internal ( $X_1$ )**

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggapan responden mengenai variabel pengendalian internal diukur dengan menggunakan lima indikator yang dioperasionalkan kedalam tujuh pernyataan. rekapitulasi skor tanggapan responden mengenai pengendalian internal yang diukur dengan menggunakan lima indikator. Secara keseluruhan dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 59.0%. Nilai tersebut berada dalam kelas interval antara 52.01% - 68% dan berada dalam kategori cukup baik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian internal pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dinilai cukup baik, terdapat gap sebesar 41.0%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengendalian internal.

### **Analisis Deskriptif E-Procurement ( $X_2$ )**

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggapan responden mengenai variabel e-procurement diukur dengan menggunakan lima indikator yang dioperasionalkan kedalam enam pernyataan. rekapitulasi skor tanggapan responden mengenai e-procurement yang diukur dengan menggunakan lima indikator. Secara keseluruhan dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 60.7%. Nilai tersebut berada dalam kelas interval antara 52.01% - 68% dan berada dalam kategori cukup baik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa e-procurement yang dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dinilai cukup baik. Terdapat gap sebesar 39.3%, menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam indikator e-procurement.

### **Analisis Deskriptif Fraud ( $Y$ )**

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada auditor inspektorat Kabupaten Bandung Barat tanggapan responden mengenai variabel fraud diukur dengan menggunakan empat indikator yang dioperasionalkan kedalam lima pernyataan. rekapitulasi jawaban responden mengenai fraud yang diukur menggunakan empat indikator. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai persentase skor tertinggi yang diperoleh sebesar 66% mengenai kecurangan manajemen, sedangkan persentase skor terendah diperoleh sebesar 51% mengenai kecurangan yang melibatkan orang dalam dan orang luar organisasi. Secara keseluruhan dari tabel tersebut diperoleh nilai persentase sebesar 57.6%. Nilai 57.6% tersebut jika mengacu pada kriteria Umi Narimawati (2007:85) termasuk dalam kategori cukup tinggi. Terdapat gap sebesar 42.4% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kecurangan yang ditemukan auditor Inspektorat Kabupaten Bandung Barat tergolong cukup baik.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Fraud**

Berdasarkan hasil pengujian terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh pengendalian internal ( $X_1$ ) lebih besar dari nilai t-tabel yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 berpengaruh, artinya pengendalian internal berpengaruh terhadap fraud kearah positif dimana pengendalian internal yang baik maka fraud akan naik. Hal tersebut menurut kepala Badan Pemeriksaan Keuangan menjelaskan bahwa pengendalian internal yang baik bukan jaminan fraud menurun karena ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu Kurangnya sumber daya aparatur yang memahami sistem penganggaran berbasis kinerja, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Harry Azhar Azis (2015). Pengendalian internal memberikan pengaruh sebesar 16.3% terhadap fraud, sedangkan sisanya 83.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Secara keseluruhan hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator control activities dengan kriteria cukup baik dan indikator information and communication

dengan kriteria cukup baik yang jika di rata-ratakan dengan indikator yang lain dibawah nilai variabel, merupakan indikator dengan presentase terendah pertama dan kedua terendah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengendalian internal berpengaruh sebesar 16.3% terhadap fraud dengan nilai korelasi cukup/sedang yang berarti pengendalian internal memberikan pengaruh yang cukup/sedang terhadap fraud pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pengaruh pengendalian internal terhadap fraud menunjukkan bahwa pengendalian internal yang semakin baik akan diikuti dengan berkurangnya fraud. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengendalian internal memberikan pengaruh sebesar 16.3% terhadap fraud, sedangkan sisanya 83.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

### **Pengaruh E-procurement terhadap fraud**

Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh e-procurement ( $X_2$ ) lebih besar dari nilai t-tabel yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 berpengaruh, artinya e-procurement berpengaruh terhadap fraud. Pengaruh sebesar 30.1% dengan kriteria cukup/sedang terhadap fraud sedangkan sisanya 69,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Secara keseluruhan hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan dilapangan melalui indikator confidentiality dengan kriteria cukup baik dan indikator non repudiation dengan kriteria cukup baik yang jika di rata-ratakan dengan indikator lain merupakan presentase terendah pertama dan terendah kedua dengan nilai gap yang menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan e-procurement.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, e-procurement berpengaruh sebesar 30.1% terhadap fraud dengan nilai korelasi cukup/sedang berarti, e-procurement memberikan pengaruh yang cukup terhadap fraud pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pengaruh e-procurement terhadap fraud menunjukkan bahwa e-procurement yang semakin baik akan diikuti dengan berkurangnya fraud. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa e-procurement memberikan pengaruh sebesar 30.1% terhadap fraud sedangkan sisanya 69,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengendalian internal dan e-procurement terhadap fraud, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengendalian internal berpengaruh cukup/sedang terhadap fraud pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, dimana pengendalian internal yang baik akan mengurangi fraud. Namun dalam pelaksanaannya masih belum memadai karena beberapa masalah seperti:
  - a) Masih terdapat kelemahan pada indikator control activities dimana pengelola aset daerah tidak melaksanakan pengecekan bukti fisik yang optimal terhadap aset daerah yang dimiliki.
  - b) Masih terdapat kelemahan pada indikator information and communication yaitu Kurangnya koordinasi antara DPPKAD dengan SKPD dan instansi lain dalam penatausahaan aset.
- 2) E-procurement berpengaruh cukup/sedang terhadap fraud pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, dimana pelaksanaan E-procurement yang baik akan mengurangi fraud. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena beberapa masalah seperti:
  - a) Terdapat kelemahan pada indikator confidentiality dan non-repudiation di bidang pengadaan elektronik.
  - b) Pada proses pengadaan masih terdapat panitia yang melaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Saran**

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengendalian internal dan e-procurement terhadap fraud maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

#### **1) Saran Operasional**

- a) Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam meningkatkan pengendalian internal perlu melakukan melakukan pengecekan fisik terhadap aset daerah yang dimiliki dan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi, pencatatan, dan penilaian aset instansi diharapkan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang solid dengan SKPD lain dan pihak external pemerintah (dalam hal ini pemerintah kabupaten bandung).
- b) Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam meningkatkan e-procurement adalah dengan meningkatkan aspek keamanan yang ditinjau dari indikator confidentiality dan non-repudiation di bidang pengadaan, dan peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap panitia pelaksana kegiatan dan unit layanan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tertib dan bertanggung jawab serta taat pada aturan yang berlaku.

## 2) Saran Akademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi pengendalian internal seperti sumber daya aparatur/pegawai, sistem penganggaran berbasis kinerja, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Amanda pane 2013. pengaruh penerapan pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran dan implementasinya terhadap perilaku kecurangan Tesis: Universitas pajajaran: 2013
- Adrian Sutedi 2014. Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai Permasalahannya. Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika
- Afian Malik 2010. Pengantar Bisnis jasa pelaksana konstruksi. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Agoes, Sukrisno 2012. Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi4-Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF
- Alfred Mainassy 2014. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Halmahera Utara Jurnal UNIERA Volume 2 Nomor 2; ISSN.2086-0404/Agustus/2013
- Alvin A.Arens, Redal J.Elder, Mark S. Beasley 2014. Auditing and Assurance services An integrated Approach
- Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Badzlina Daroyani Novitaningrum 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya) Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume2,Nomor1,Januari2014.
- Bandung: Alfabeta
- Bona P. Purba 2015. Fraud dan Korupsi Pencegahan, Pendektasian, dan Pemberantasannya. Cetakan pertama. Jakarta timur: Lestari Kiranatama.
- Chairun Nisak, Prasetyono, Fitri Ahmad Kurniawan 2013. Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Kabupaten Bangkalan JAFFA Vol. 01 No. 1 April 2013 Hal. 15 - 22 15
- COSO 2013. Internal Control – Integrated Framework : Executive Summary, Durham, North Carolina, May
- Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS. Cetakan
- Indra Bastian 2010. Akuntansi sektor publik : suatu pengantar Jakarta : Erlangga

Jakarta : Kemitraan dan LPSE Nasional

Juliansyah Noor 2012. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Jakarta: Kharisma Putra Utama

Karen L.Hooks 2011. Auditing and assurance services

Karyono 2013. Forensic fraud . Yogyakarta: CV Andi Offset

Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 oleh BPK

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Liya Indah Wulandari 2014. Kajian Penerapan E-Procurement Untuk Mengurangi Penyimpangan Pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Di Kota Malang Jurnal Rekayasa Sipil / Volume 8, No.1 – 2014 ISSN 1978 – 5658

Muhammad Faisal 2013. Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus Aaj 2(1)(2013) Accounting Analysis Journal hal:4

Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2002. Metode Penelitian Bisnis untuk

Odi Setiawan 2014. Penerapan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Pln Kota Balikpapan eJournal Ilmu Pemerintahan, 2 (4) 2014: 3092 -3104 ISSN 0000-0000ejournal.ip.fisip.unmul.org/©Copyright.

Oguda Ndege Joseph Odhiambo Albert Prof John Byaruhanga 2015. Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County International Journal of Business and Management Invention ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X www.ijbmi.org || Volume 4 Issue 1 || January. 2015 || PP.47-5

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Purwanto, Erwan Agus, et all, 2008, E-Procurement di Indonesia: Pengembangan

Pustaka Pelajar

Rahmawan Satriyo Nugroho, Alfi Haris Wanto, Trisnawati 2011. Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan) Jurnal administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.1 1, Hal. 1905-1911|

Samsul Rambli 2014. Buku bacaan wajib sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka

Sigit Suseno. 2011. “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”. Makalah Seminar Anti Korupsi yang disampaikan pada 26 Maret 2011.

Subana, M. Dan Sudrajat. 2005. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Sulastri Binsar H Simanjuntak 2014. Fraud Pada Sektor Pemerintah Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Etika Organisasi Pemerintah (Studi Empiris Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) 220 Fraud Pada Sektor Pemerintah Volume. 1 Nomor. 2 01/09/2014 hal.199-1227 ISSN : 2339-0859 hal : 22

- Sutedi Adrian 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Ed. 2, Jakarta: Sinar Grafika
- Theodorus M. Tuanakotta 2013. *Audit Berbasis ISA (Internantional Standards on Auditing)*
- Tim visi Yustisia 2015. *Konsolidasi Paling aupdate Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka
- Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada tanggal 1 April 2016
- Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis
- Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) 2013. *Good Practices in ensuring compliance with article 9 of the United Nations convention against Corruption*, New York, September
- William F. Messier, Steven M. Glover, dan Douglas F. Prawitt 2014. *Jasa Audit dan Assurance:pendekatan sistematis edisi 8-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.